

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
( BRIDA) PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**JL. Garuda No.30A PALU**

**Telp/Fax :(0451) 8446226, 8888060**

**Website : [www.bppid.sultengprov.go.id](http://www.bppid.sultengprov.go.id)**

**Email : [bridasulteng@gmail.com](mailto:bridasulteng@gmail.com)**





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
( **B R I D A** )

JL. GARUDA NOMOR 30A Telp./Fax. (0451) 426810 - 457103 PALU 94111  
Website : [www.balitbangda.sultengprov.go.id](http://www.balitbangda.sultengprov.go.id) Email : [balitbangda@sulteng.go.id](mailto:balitbangda@sulteng.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : *800.5.1/58/set*

**T E N T A N G**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
  - b. bahwa RENJA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
  - 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah”** Tahun 2024 ini dapat disusun.

Penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD serta sebagai masukan dan evaluasi dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 9 Januari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH' and 'BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I . PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2023</b>	<b>4</b>
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Tahun 2023.....	5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	10
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
	24



**TABEL II : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN II**

**TABEL III : RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan sesuai dengan kondisi wilayah atau kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana kerja harus menyesuaikan dengan dokumen RKPD yang akan menjadi dokumen Renja OPD. Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja OPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan APBD (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan



- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141).
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### *Maksud*

1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

#### *Tujuan*

Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.



## **1.4. Sistematika Penyusunan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Tahun 2023

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

**Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut



## BAB II

# EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

### 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan. Namun demikian, paradigma perencanaan pembangunan tentunya tidak akan berjalan statis, namun dinamis seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaannya.

Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.245.732.380,00 dengan realisasi Rp. 15.951.512.254.00 pada rencana pos belanja langsung T.A 2023. Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta Meningkatnya Pelayanan Sektor Publik yang didukung 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan







No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD provinsi tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD provinsi tahun berjalan (tahun n-1) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi/d Tahun 2023 (TW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)									
								I	II	III	IV													
		5.1.01.1.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	1 Lap	1 Lap	101,057,009	1 Lap	37,174,800	1 Lap	171,287,850	-	-	17.94	30,726,460	80,51	104,176,540	99.74	170,849,290	30,726,460	67,901,260	0.40	0.67	
		5.1.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 Dok	2 Dok	146,108,436	2 Dok	59,387,500		315,760,146	18.53	58,500,000	42.53	134,295,000	97.94	204,467,550	98.23	310,177,550	6,500,000	65,887,500	0.21	0.45	
		5.1.01.1.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							292,810,146	19.98	58,500,000	43.64	127,795,000	97.87	197,967,550	98.23	287,627,550					
		5.1.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang						-	-	0.00	0,00			0.00						
		5.1.01.1.05.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Perundang-undangan	2 lap	2 lap	146,108,436		59,387,500		22,950,000	-	-	28.32	6,500,000	100.00	6,500,000	98.26	22,550,000	6,500,000.00	65,887,500		2.87	
		5.1.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Lap	1 Lap	1,442,661,694	1 Lap	1,106,213,428	B	866,173,884	3.99	34,588,257	6.46	55,976,457	0.00	335,117,557	99.52	861,989,807	90,564,714	1,196,778,142		1.38	
		5.1.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	26,744,324	1 Paket	18,526,303	1 Paket	31,249,903	-	0.00		0.00		98.91	30,908,900	0	18,526,303		0.59		
		5.1.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	158,530,989	1 Paket	71,581,250	1 Paket	81,276,115	31.56	25,648,257	0.00	91.25	71,073,000	99.30	80,706,500	25,648,257	97,229,507		1.20		
		5.1.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	49,596,963	1 Paket	40,130,050	1 Paket	245,347,962	-	10.45	25,648,257	79.61	25,648,257	99.22	243,427,757	25,648,257.00	65,778,307		0.27		
		5.1.01.1.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	29,936,600	1 Paket	13,000,000	1 Paket	16,550,000	-	39.51	6,538,200	35.03	8,338,200	100.00	16,549,350	6,538,200	19,538,200		1.18		
		5.1.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 lap	1 lap	1,177,852,818	1 lap	962,975,825	1 lap	491,749,904	1.82	8,940,000	4.84	23,790,000	81.65	230,058,100	99.72	490,397,300	32,730,000	995,705,825		2.02	
		5.1.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	436,225,776	1 lap	528,798,397	1 lap	2,025,315,185	-	0.00		48.08	93,300,000	97.36	1,971,791,556		528,798,397		0.26		
		5.1.01.1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	1 lap	1 lap	436,225,776	1 lap	528,798,397	1 lap	2,025,315,185	-	0.00		48.08	93,300,000	97.36	1,971,791,556		528,798,397		0.26		



No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan / Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD provinsi tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD provinsi tahun berjalan (tahunn-1) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (TW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd. Tahun 2026 (%)					
					I	II	III	IV															
		5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan	1 lap	1 lap					0.00		0.00		0.00								
		5.1.01.108	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	750,428,931	1 lap	259,798,300	1 lap	555,896,057	5.54	30,786,274	18.02	100,190,667	63.90	215,995,974	97.88	544,134,684	130,976,941	390,775,241	0.70	
		5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	1 lap	1 lap	47,734,039	1 lap	15,315,000	1 lap	10,700,000	-		0.00	-	0.00	-	99.25	10,620,000	-	15,315,000.00	1.43	
		5.1.01.108.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	495,918,581	12 bulan	158,663,300	12 bulan	167,226,057	17.69	29,586,274	40.54	67,790,667	64.00	130,708,244	96.75	161,786,454	97,376,941	256,040,241	1.53	
		5.1.01.108.03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	158,204,106	1 Paket	67,320,000	1 Paket	41,160,000	-		0.00	-	59.11	15,462,730	89.32	36,762,730	0	67,320,000	1.64	0.43
		5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 paket	1 paket	48,572,205	1 paket	18,500,000	1 paket	336,810,000	0.36	1,200,000	9.62	32,400,000	72.02	69,825,000	99.45	334,965,500	33,600,000	52,100,000	0.15	1.07
		5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	935,776,403	1 lap	398,935,000	1 lap	692,010,000	7.74	53,550,000	27.65	191,313,900	64.66	511,025,260	97.41	674,052,960	200,797,900	559,502,900	0.81	0.60
		5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	50,457,992	1 Paket	17,255,000	1 Paket	17,255,000	-		48.17	8,311,900	52.84	9,117,900	89.66	15,471,100	8,311,900.00	25,566,900	1.48	0.51
		5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	794,857,487	1 Paket	341,450,000	1 Paket	362,400,000	14.78	53,550,000	38.34	138,936,000	54.61	228,323,360	96.74	350,584,360	192,486,000	533,936,000	1.47	0.67
		5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	90,460,924	1 Paket	40,230,000	1 Paket	312,355,000	-		14.11	44,066,000	77.07	273,584,000	98.60	307,997,500	-	-	-	-
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terselenggaranya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								-		0.00		0.00		0.00					
	Meningkatnya Fasilitas Kajian Akademik Persiapan DOB	4.07.01.15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kajian Akademik yang difasilitasi	15 Dok	15 Dok	134,740,829	15 Dok	699,998,975	15 Dok	1,205,457,400	-		20.09	242,189,700	65.29	457,007,913	100.00	1,205,452,936	242,189,700	942,188,675	0.78	6.99



**BAB II**  
**RENJA Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD provinsi tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD provinsi tahun berjalan (tahun n-1) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd. Tahun 2026 (%)							
					I	II			III	IV													
		4.07.01.15.01	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	1 lap	0	-	1 lap	448,995,775	1 lap	1,205,457,400	-	20.09	242,189,700	65.29	457,007,913	100.00	1,205,452,936	242,189,700	692,189,475	0.57	-	
		4.07.01.15.02	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	94,071,253	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.07.01.15.11	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi Bidang Badang Usaha Milik Desa yang di manfaatkan Perangkat	1 lap	1 lap	40,669,576	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.07.01.15.12	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	290,768,413	1 lap	249,999,200	1 lap	-	-	0.00	0.00	0.00	0	249,999,200	-	-	-	-	0.86	
	Meningkatnya Fasilitas Kajian Akademik Persiapan DOB	4.07.01.16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	11 Dok	11 Dok	488,707,049	11 Dok	299,998,050	11 Dok	324,999,550	5.64	18,340,000	25.64	83,330,925	61.51	153,768,836	99.85	324,513,611	101,670,925	401,668,975	1.24	0.82
		4.07.01.16	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,082,670	1 Dok	-	1 Dok	3,120,000	-	0.00	-	0.00	0	100.00	3,120,000.00	-	-	-	-	-
		4.07.01.16	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	78,125,000	1 Dok	-	1 Dok	3,120,000	-	100.00	3,120,000	100.00	3,120,000	100.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000	1.00	0.04	
		4.07.01.16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	310,499,379	1 Dok	299,998,050	1 Dok	318,759,550	5.75	18,340,000	25.16	80,210,925	61.80	150,648,836	99.85	318,273,611	98,550,925	398,548,975	1.25	1.28
	Meningkatnya Nilai Asepek Daya Saing Daerah	4.07.01.17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	13 Dok	13 Dok	450,234,428	13 Dok	249,998,950	13 Dok	684,023,766	2.76	18,870,000	32.13	219,788,323	64.71	323,557,723	98.31	672,451,566	137,159,733	387,159,683	0.57	0.86
		4.07.01.17.0	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	72,000,000	1 Dok	-	1 Dok	336,993,733	-	30.12	101,498,590	63.21	158,022,890	99.36	334,825,273	-	-	-	-	-
		4.07.01.17.11	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	285,659,428	1 Dok	249,998,950	1 Dok	149,999,383	12.58	18,870,000	61.44	92,164,983	68.44	102,659,883	97.29	145,930,383	111,034,983	361,033,993	2.41	1.26



**BAB II**  
**RENJA Tahun 2024**

		4.07.01.17.12	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	92,575,000	1 Dok	-	1 Dok	197,030,650	-	13.26	26,124,750	62.87	62,874,950	97.29	191,695,910	26,124,750.00	26,124,750	0	0.13	0.28
	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah di Sulawesi Tengah	4.07.01.18	Pengembangan inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	5 Dok	5 Dok	428,322,349	5 Dok	350,000,100	5 Dok	824,999,850	5.85	48,280,818	21.36	176,256,004	71.99	395,955,059	99.44	820,403,920	224,536,822	574,536,822	0.70	1.34
		4.07.01.18	Penelitian dan Pengembangan, Perekrayan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	224,250,000	1 Dok	161,976,775	1 Dok	574,999,850	5.08	28,947,250	15.89	91,390,050	55.33	166,002,880	99.35	571,248,991	120,337,300	282,314,075	0.49	1.26
		4.07.01.18	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Lap	1 Lap	115,919,768	1 Lap	50,000,000	1 Lap	115,864,800	15.84	18,358,568	15.84	18,358,568	96.12	111,368,308	99.60	115,397,758	36,717,136	86,717,136	0.75	0.75
		4.07.01.18	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Kegiatan yang didesmanasikan bersifat Inovatif	1 Lap	1 Lap	88,152,581	1 Lap	138,023,325	1 Lap	134,135,200	0.73	975,000	49.58	66,507,386	88.41	118,583,871	99.72	133,757,171	67,482,386.00	205,505,711.00	1.53	2.33



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD provinsi tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD provinsi tahun berjalan (tahunn-1) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (TW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)				
								I	II	III	IV								
<b>Jumlah</b>					21,020,020,024	11,651,857,436	18,245,732,380	8.88	1,619,706,552	28.17	5,140,066,805	57.46	8,357,631,832	87.43	15,951,312,254	6,759,773,357	18,411,630,793	1.01	0.88
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Sampai dengan bulan September Realisasi program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan																			
Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang di laksanakan Menunggu Proses SPI																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi sesuai bulan berjalan																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Realisasi sesuai bulan berjalan																			



## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BRIDA

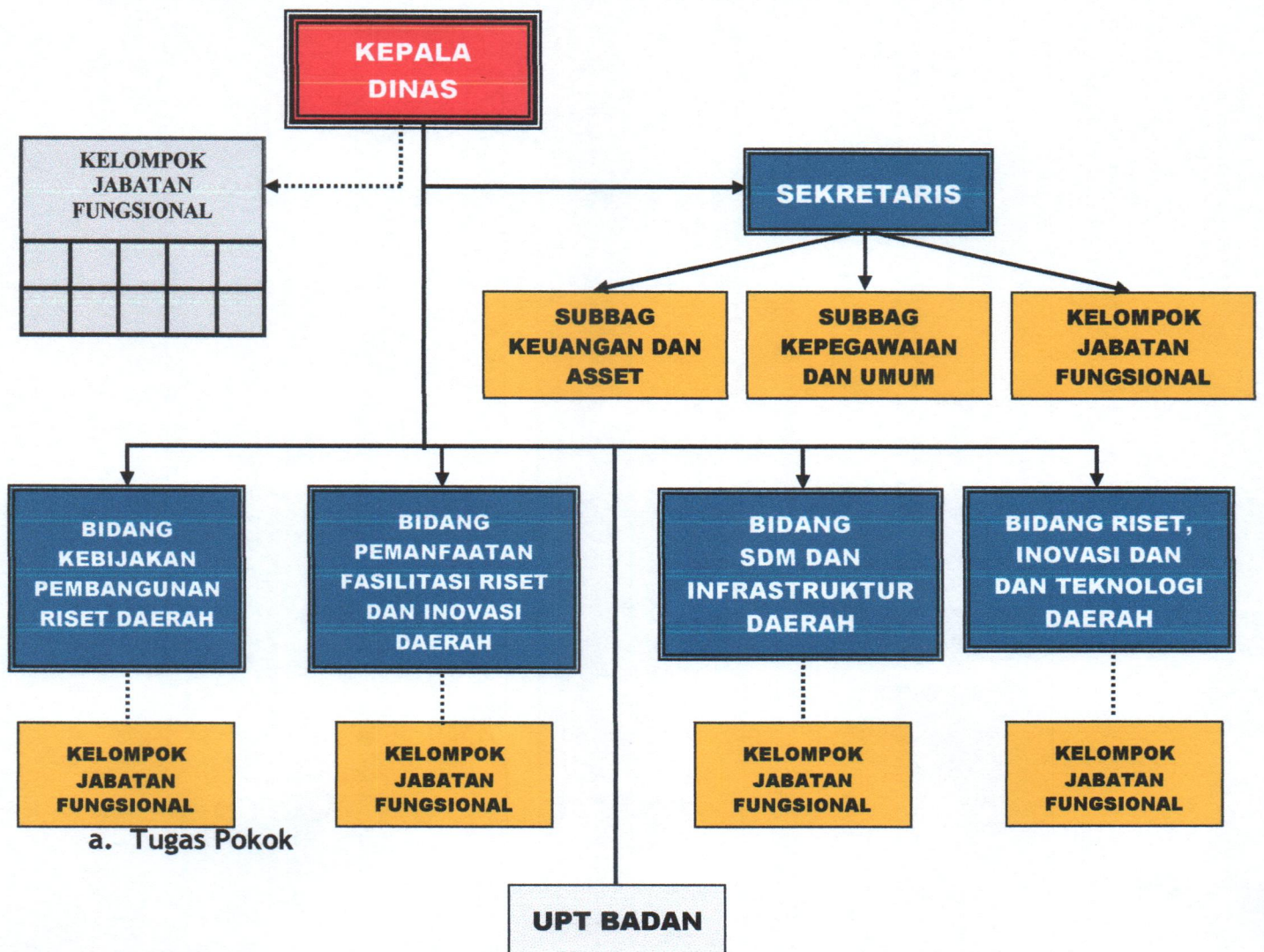
Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta susunan organisasi sebagai berikut :

### a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - 2.1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.
- 4) Bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah.
- 5) Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah.
- 6) Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.





**a. Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

**c. Fungsi**

1. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
4. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

**d. Permasalahan dan Hambatan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dapat berupa hambatan (kendala), kelemahan dan kekuatan organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak semua kegiatan litbang dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah;
  2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;
  3. Belum adanya sistem informasi (*linked database litbang*) kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan oleh PD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kajian;
  4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah bekum berbasis riset.
  5. Mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis iptek;
-



7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai peraturan daerah;
2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya berujung pada kebijakan tetapi implementatif/terapan, agar hasil penelitian dapat langsung dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Selain beberapa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga menjadi perhatian BRIDA saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis inovasi.

---



## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Rencana Kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU	
1					2	4	6	8	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,5 Indeks	12.495.802.128	
5	05	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	690.046.000	
5	05	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	2 dok	74.405.000
5	05	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/ DPA – SKPD	4 dok	568.241.000
5	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	31.675.000
5	05	01	1	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	15.725.000
5	05	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60	9.576.000.542	
5	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangannya	60 Orang	8.224.650.542
5	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1.138.070.000
5	05	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 lap	213.280.000
5	05	01	1	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah lap.pengelolaan barang milik daerah	1 lap	34.490.000	
5	05	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, SKPD	Jumlah lap penilaian barang perangkat daerah	1 lap	34.490.000



Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU
1						2	4	6	8
5	05	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	125.426.213
5	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapannya	1 paket	62.784.000
5	05	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	35.592.213
5	05	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan – Undangan yang dilaksanakan	2 Lap	27.050.000
5	05	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	1 lap	354.137.187
5	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	16.406.219
5	05	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	77.835.800
5	05	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	26.755.168
5	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	13.320.000
5	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang di selenggarakan	1 Tahun	219.820.000
5	05	01	1	07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60	828.769.136
5	05	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit Bangunan	828.769.136



Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU
1					2	4	6	8
5	05	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	62	366.188.050
5	05	01	1	08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip yang terdigitalisasi	150 Arsip	2.528.050
5	05	01	1	08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12 Bulan	194.500.000
5	05	01	1	08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Data dan informasi yang terpenuhi dalam konten website	50 Konten	69.410.000
5	05	01	1	08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	1 Paket	99.750.000
5	05	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60	529.745.000
5	05	01	1	09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang terbayarkan	26 unit	22.255.000
5	05	01	1	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	456.200.000
5	05	01	1	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	39 Unit	51.290.000



Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU
1						2	4	6	8
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas</li> <li>- Persentase peningkatan kualitas SDM IPTEK</li> <li>- Persentase peningkatan kualitas Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>- Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</li> <li>- Persentase Penerapan Inovasi Daerah</li> </ul>	100 %	4.108.898.350
5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Persentase Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	679.999.950
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peta Jalan Riset dan Inovasi</li> <li>- Jumlah Laporan Implementasi Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>- Jumlah Dokumen Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten</li> <li>- Jumlah Dokumen Pengukuran Indikator Riset dan Inovasi Daerah</li> </ul>	1 dok 1 Lap 1 dok 1 Lap	679.999.950
5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan</li> <li>- Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan 3. Persentase Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah yang Terlayani Tepat Waktu</li> </ul>	100 %	212.498.850
5	05	01	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1. Jumlah Hasil Riset Daerah yang	2 Riset	127.499.500



							Termanfaatkan		
5	05	01	1	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	2. Jumlah Hasil Inovasi Daerah yang termanfaatkan	2 Inovasi	
5	05	01	1	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemerintah Provinsi Sulawesi	100 %	42.499.700
5	05	01	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemenuhan persyaratan akreditasi JURNAL	100 %	42.499.650
5	05	01	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	- Persentase Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK - Persentase Infrastruktur Riset yang berfungsi	100 %	480.999.950
5	05	01	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	- Jumlah SDM Jabatan Fungsional Peneliti yang terlatih - Jumlah SDM Analis Pemanfaatan IPTEK yang terlatih - Jumlah SDM Kelompok Masyarakat yang terlatih	6 Orang 13 Orang 490 Orang	270.018.100
5	05	01	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	- Jumlah Dokumen rencana penyediaan SARPRAS Pendukung - Jumlah Dokumen Rencana Kawasan SAINS Park	1 dok 1 dok	210.981.850



Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU
						Sebelum	Sebelum	Sebelum	Sebelum
1						2	4	6	8
5	05	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penerapan Inovasi Daerah	100 %	2.735.399.600
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah Inovasi Daerah yang ditetapkan 2. Jumlah TTG yang diusulkan	79 Inovasi 3 TTG	1.629.075.000
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Inovasi Daerah yang terverifikasi	15 Buku dan Artikel	245.391.400
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Persentase Inovasi Daerah yang terseleksi	100 %	860.933.200



Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat beberapa Kerja sama yang akan dilaksanakan antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pihak-pihak terkait antara lain :

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang akan dilaksanakan di Parigi pada Triwulan II TA. 2024;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kordinator dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi Informasi...
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi akan Melaksanakan Kegiatan antara lain :
  - Riset Imam Sya'ban bekerjasama dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
  - Riset Keong Sisto bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Dampak Hilirisasi Nikel bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Perhitungan dan Validasi DBH Hasil Pajak dan Non Pajak bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Investasi dan Kemiskinan bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Goa Prasejarah bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
  - Riset Kemiskinan dan Stunting bekerjasama dengan UIN yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Megalith bekerjasama dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
  - Riset Kultivar Unggul Durian bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Bawang bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV



- Riset Paprika bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset Tetra Pandu bekerjasama dengan Bappeda yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Riset TTG PLTS Atap bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
  - Riset La Brida bekerjasama dengan Universitas Akhairaat yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi akan Melaksanakan Kegiatan antara lain :
- Rencana Kegiatan Diseminasi Sistemisasi di Kabupaten Poso
  - Rencana Kegiatan Sosialisasi HKI di Kabupaten Parigi Moutong
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah akan Melaksanakan Kegiatan antara lain :
- Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Tahun 2025 bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV
  - Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah bekerjasama dengan Internal Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
  - Kajian Pemekaran DOB Kabupaten Donggala bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang akan dilaksanakan pada Triwulan I
  - Monitoring dan Evaluasi Kampung Ristek bekerjasama dengan Internal Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan 6 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada Triwulan I,II,III, dan IV
  - Pertemuan Koordinasi IDSD Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Internal Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Instansi Terkait yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang SDM dan Infrastruktur Riset akan Melaksanakan Kegiatan antara lain :
- Peningkatan SDM Kelompok Masyarakat (Koperasi) dalam Pengembangan Bawang Merah local bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan III
  - Peningkatan SDM kelompok Masyarakat (Koperasi) dalam Pengembangan Produksi Bawang Goreng yang berbahan baku Bawang Sigi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan III



- Wallace Line Festival yang melibatkan Masyarakat dan UMKM yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV
- Peningkatan SDM kelompok Masyarakat (Koperasi) dalam Budidaya Kelapa Genjah bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I
- Peningkatan SDM dan Infrastruktur untuk Ketahanan Wilayah dan Masyarakat pada Daerah Rentan Bencana di Desa Tompe bekerjasama dengan BRIDA/BPBD Prov Sulteng yang akan dilaksanakan pada Triwulan I
- Peningkatan SDM dan Infrastruktur untuk Penanganan Stunting dan Peningkatan Ekonomi pedesaan di Kabupaten Donggala bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan II
- Peningkatan SDM dan Infrastruktur untuk Penanganan Stunting dan Peningkatan Ekonomi pedesaan di Kabupaten Parigi Mautong bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan II
- Peningkatan SDM Kapasitas Teknologi Alat tangkap Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Donggala bekerjasama dengan Peneliti yang akan dilaksanakan pada Triwulan II
- RAKORDA BRIDA SULTENG Bekerjasama dengan BRIDA Kab. Parigi Mautong yang akan dilaksanakan pada Triwulan II
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Schistosomiasis di Desa Uawa bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I
- Peningkatan SDM dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau Poso di Tentena bekerjasama dengan Peneliti yang akan dilaksanakan pada Triwulan II
- Deseminasi Riset Goa Prasejarah di Morowali Utara serta peran Masyarakat dalam Perlindungan Cagar Budaya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dilaksanakan pada Triwulan III



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA.

### 5.1 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

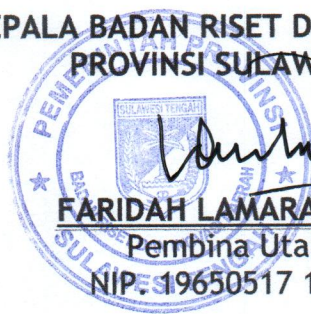
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
  - b. Menjaga konsistensi anatar RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

### 5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006